



AHMAD YANI

Penundaan Implementasi Kurikulum 2013 di Indonesia: Perspektif Budaya dan Sosial-Politik di Era Kabinet Jokowi-JK

RESUME: Kebijakan penundaan Kurikulum 2013 adalah salah satu isu kontroversial di awal pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Kebijakan tersebut menjadi sangat menarik untuk diteliti, karena tidak terlepas adanya faktor budaya, sosial, politik, dan peran media. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui persepsi guru terhadap Kurikulum 2013, sikap guru terhadap penundaan Kurikulum 2013, serta menelusuri sejumlah alasan penolakan terhadap Kurikulum 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey. Populasi penelitian adalah Guru dan Pengawas Sekolah pada semua jenjang pendidikan. Pengumpulan data dilakukan melalui jejaring sosial, khususnya FB (Face Book). Jumlah responden yang terjaring adalah 355 orang, namun yang lengkap mengisi instrumen ada 324 orang. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner dan skala sikap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya guru memiliki potensi untuk mampu melaksanakan Kurikulum 2013. Ketidaknyamanan responden untuk melaksanakan Kurikulum 2013 disebabkan oleh aturan yang sangat rumit; dan bersamaan dengan itu, guru cenderung masih hidup dalam suasana birokratis-feodalistik (bukan akademik). Berdasarkan temuan di atas, secara politis, peneliti menyarankan agar Kabinet Jokowi-JK melanjutkan Kurikulum 2013, selain dengan melakukan upaya perbaikan sistem kurikulumnya, juga agar media massa mendukung kebijakan Kurikulum 2013 secara optimal.

KATA KUNCI: Kurikulum 2013; Implementasi; Guru dan Pengawas; Budaya dan Media Massa; Pemerintahan Jokowi-JK.

ABSTRACT: "Deferment of 2013 Curriculum Implementation in Indonesia: The Cultural and Social-Political Perspectives in the Era of Jokowi-JK's Government". Deferment policy for 2013 Curriculum is one of the most controversial policies in the early Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK) government. The policy becomes very interesting to study due to it is connected to cultural, socio-political, and role of the media. The purposes of this study are to determine teachers' perceptions of the 2013 Curriculum, knowing teachers' attitude towards deferment policy for 2013 Curriculum, and exploring number of reasons for rejecting 2013 Curriculum. Method used in this research is survey method. Population research is Teachers and Supervisors at all levels of education. Data is collected using social media, especially FB (Face Book). The number of respondents was 355 people, but only 324 people filling instrument completely. Instrument used was a questionnaire and attitude scale. The results of this research showed that basically teachers have had the potential to be able to implement the 2013 Curriculum. The teachers's uncomfortable feeling towards the implementation of 2013 Curriculum are more caused by complexity of the instructions; and along with it is teachers are still living in a bureaucratic atmosphere (not academic). Based on the findings, politically, researcher suggested the Jokowi-JK government to seriously continue the 2013 Curriculum, not only by improving its curriculum system, but also involving the mass media so that they can take a part for supporting optimal the 2013 Curriculum.

KEY WORD: 2013 Curriculum; Implementation; Teachers and Supervisors; Culture and Mass Media; Jokowi-JK Government.

About the Author: Dr. Ahmad Yani adalah Dosen Senior di Departemen Pendidikan Geografi FPIPS UPI (Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia), Jalan Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154, Jawa Barat, Indonesia. Alamat e-mail: ahmadyani@upi.edu

How to cite this article? Yani, Ahmad. (2016). "Penundaan Implementasi Kurikulum 2013 di Indonesia: Perspektif Budaya dan Sosial-Politik di Era Kabinet Jokowi-JK" in *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, Vol.9(1) May, pp.153-172. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press and UPI Bandung, ISSN 1979-0112.

Chronicle of the article: Accepted (January 14, 2016); Revised (April 21, 2016); and Published (May 20, 2016).

PENDAHULUAN

Penundaan implementasi Kurikulum 2013 adalah salah satu “gebrakan” kebijakan di awal pemerintahan Kabinet Kerja Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Pemerintah menunda implementasi Kurikulum 2013 karena kelahirannya dianggap terburu-buru. Gebrakan ini tentu saja menimbulkan reaksi dari masyarakat, ada yang mendukung dan ada pula yang menolak. Diakui atau tidak, sisa-sisa sentimen politik pasca PILPRES (Pemilihan Langsung Presiden) Tahun 2014, antara pendukung Prabowo Subianto – Hatta Rajasa dan Jokowi – JK, masih sangat terasa. Berbagai komentar tidak lagi bersifat akademik-proporsional, tetapi lebih mengarah pada keberpihakan politik yang didasarkan pada suka dan tidak suka (*like and dislike*) terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Alvin, 2015).

Penundaan Kurikulum 2013 adalah salah satu kebijakan yang kontroversial di antara kebijakan-kebijakan lainnya di awal pemerintahan Jokowi-JK. Kebijakan kontroversi lain, misalnya, tentang aturan tidak boleh rapat dinas di hotel, anjuran hidup sederhana, membiasakan makan singkong, dan membatasi jumlah undangan pada resepsi pernikahan anak pejabat dan PNS (Pegawai Negeri Sipil). Anjuran hidup sederhana diatur melalui Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana dari MENPAN-RB RI (Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia).

Kebijakan kontroversi lainnya juga muncul dari Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang mewacanakan akan menjual gedung BUMN, lelang jabatan Direksi BUMN kepada warga negara asing, dan pembatasan penerimaan pegawai BUMN yang mengenakan jilbab. Kontroversi ini muncul dari semangat Kabinet Jokowi-JK, yang ingin menunjukkan bukti dari janji-janji kampanyenya. Sementara itu, tanggapan dari pihak yang kurang simpati terhadap pemerintahan baru, menudingnya sebagai pencitraan semata. Kebijakan penundaan implementasi Kurikulum 2013 adalah

juga dianggap sebagai bentuk pencitraan (Juliaman, 2014; dan Wijaya, 2015).

Untuk meredakan polemik Kurikulum 2013, Mendikbud RI (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia), Anis Baswedan, segera mengeluarkan Permendikbud RI (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia) Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013. Isi peraturan tersebut, diantaranya, tertera pada pasal (1) yang menyatakan bahwa satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang melaksanakan Kurikulum 2013, sejak semester pertama tahun pelajaran 2014/2015, (harus) kembali melaksanakan Kurikulum 2006 mulai semester kedua tahun pelajaran 2014/2015. Adapun satuan pendidikan yang diperbolehkan melanjutkan Kurikulum 2013 diatur pada pasal 2 ayat (1): Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 selama 3 semester tetap menggunakan Kurikulum 2013 (Kemendikbud RI, 2014a).

Satuan pendidikan yang diperbolehkan melaksanakan Kurikulum 2013 disebut sebagai “sekolah rintisan”. Jumlah sekolah rintisan di seluruh Indonesia ada 6,410 sekolah, dengan jumlah guru sebanyak 56,113 orang, dan jumlah peserta didik sebanyak 1,535,065 siswa. Sekolah tersebut tersebar di DI (Daerah Istimewa) Aceh sebanyak 132 sekolah; Bali sebanyak 203 sekolah; Jawa Tengah sebanyak 881 sekolah; Jawa Barat sebanyak 887; Jawa Timur sebanyak 1,053; Sumatera Utara sebanyak 263; Banten sebanyak 225 sekolah; DI Yogyakarta sebanyak 146 sekolah; dan Jakarta sebanyak 250 sekolah. Jumlah tersebut hanya sekitar 2.99% dari 208,000 sekolah semua jenjang pendidikan di Indonesia (Kemendikbud RI, 2014b).

Penundaan Kurikulum 2013 menjadi sangat menarik untuk diteliti, karena sejumlah alasan. Salah satunya dari aspek politik. Perdebatan terjadi antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anis Baswedan, dengan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad

Nuh, di ranah publik. Komentar keduanya tentu saja selalu bersebrangan. Menteri Anis Baswedan mengungkapkan alasan penundaan Kurikulum 2013 sebagai upaya perbaikan; sementara itu, Mohammad Nuh, sangat kecewa dan membantah setiap argumentasi Menteri Anis Baswedan. Situs berita *Okezone*, pada hari Sabtu, 13 Desember 2014, pukul 17:03 WIB (Waktu Indonesia Barat), menurunkan berita tentang "Pro-Kontra Kurikulum 2013".

Anis Baswedan menyatakan bahwa sumber masalah Kurikulum 2013 sesungguhnya berasal dari pemerintahan sebelumnya. Menurut Anis Baswedan, Kurikulum 2013 sangat merugikan siswa, orangtua siswa, dan para guru. Kurikulum 2013 terlalu berat. PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 32, pasal 94, memberi batas waktu selama tujuh tahun untuk menerapkan kurikulum baru. Kurikulum 2013 disusun oleh tim di akhir tahun 2012, namun pada awal 2013 sudah diterapkan di tiga persen jumlah sekolah di Indonesia. Pada tahun 2014, serentak diterapkan di 218,000 sekolah di Indonesia (*Okezone*, 13/12/2014).

Sementara itu, Mohammad Nuh menyatakan bahwa penundaan Kurikulum 2013 dan kembali ke Kurikulum 2006 adalah langkah mundur dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kembalinya ke Kurikulum 2006 belum tentu lebih baik daripada melanjutkan Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dipersiapkan lebih lama, sedangkan kebijakan penundaan hanya satu setengah bulan, sejak Anis Baswedan menjadi Menteri. Mohammad Nuh sangat menyalahkan penundaan Kurikulum 2013, karena para orangtua harus kembali membeli buku versi Kurikulum 2006, atau dikenal dengan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), padahal buku Kurikulum 2013 sudah digratiskan oleh pemerintah (*Okezone*, 13/12/2014).

Sebelum pro-kontra Kurikulum 2013 bergulir, situs berita *RMOL.Co* sudah sejak awal menghembuskan "isu kelemahan Kurikulum 2013" dengan menurunkan berita tentang pernyataan Sekjen FSGI (Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru

Indonesia), Retno Listiyarti, yang mendesak Menteri Anis Baswedan untuk membekukan Kurikulum 2013. Berita yang diturunkan pada hari Senin, 17 November 2014, pukul 07:02:00 WIB tersebut, katanya mengutip data hasil penelitian FSGI bahwa Kurikulum 2013 itu sulit diimplementasikan di lapangan. FSGI menyarankan untuk kembali ke KTSP, karena guru dan bukunya sudah siap (*RMOL.Co*, 17/11/2014).

Selain FSGI, Pengurus Besar PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) di Jakarta juga mengeluarkan pernyataan sikap terhadap Kurikulum 2013. Ketua PGRI, Sulistiyo, menyatakan bahwa kerangka pikir Kurikulum 2013 sukar dipahami oleh guru; metode pembelajaran yang direkomendasikan pun susah diterapkan; evaluasi pembelajaran membebani guru; kesiapan buku guru dan buku siswa yang kedodoran; dan desain pelatihan guru tidak efektif. Semua itu telah melahirkan malapetaka bagi kebanyakan sekolah di Tanah Air. Hal tersebut disampaikan oleh Sulistiyo pada acara Konferensi Pers di Gedung Pengurus Besar PGRI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada hari Kamis 11 Desember 2014 (*Okezone*, 11/12/2014).

Berbeda dengan pernyataan Sekjen FSGI dan Ketua PGRI, para guru di daerah justru menyatakan kesiapannya melaksanakan Kurikulum 2013. Penulis mengutip berita dari *Ciremai Post*, pada hari Sabtu, 20 Desember 2014, pukul 17:31 WIB, yang menurunkan berita bahwa penundaan Kurikulum 2013 disesalkan oleh banyak pihak. Sebut saja Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pendidikan Dasar di Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yaitu Sudarmo, yang menyatakan bahwa dirinya selaku Kepala UPTD Pendidikan Dasar merasa heran dengan adanya penundaan Kurikulum 2013. Sudarmo lebih lanjut menyatakan, sebagai berikut:

Kami sebenarnya sudah sangat siap untuk memakai Kurikulum 2013; dan berbagai persiapan pun telah dilakukan dengan berbagai pelatihan, sebagai penunjang kepada para Kepala Sekolah dan Guru, bahkan kami pun telah menyiapkan diri sebagai *pilot project*

penerapan Kurikulum 2013 di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat (dalam *Ciremai Post*, 20/12/2014).

Situs berita *Tempo.Co* di Jakarta, pada hari Rabu, 10 Desember 2014, pukul 15:46 WIB (Waktu Indonesia Barat) juga menurunkan berita bahwa seluruh Kepala Dinas Pendidikan di Jawa Timur sepakat untuk tetap menerapkan Kurikulum 2013. Mereka tidak menjalankan instruksi Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah, Anis Baswedan, untuk kembali ke KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) di sekolah-sekolah non-rintisan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Husnul Khuluq, menilai Kurikulum 2013 sangat bagus untuk perkembangan peserta didik, meskipun diakuinya masih ada yang perlu dibenahi (*Tempo.Co*, 10/12/2014). Terlepas dari adanya perubahan sikap di kemudian hari, namun berita ini memberi gambaran bahwa penundaan Kurikulum 2013 telah diwacanakan dan ditarik-tarik kepada ranah politik.

Kompas.com, pada hari Rabu, 13 Agustus 2014, pukul 11:13 WIB, menurunkan berita tentang Hardiman, Kepala SD (Sekolah Dasar) Pulo 03 Kebayoran Baru, Jakarta, yang mengatakan bahwa pihaknya optimistis Kurikulum 2013 akan berjalan sebagaimana mestinya. Widiani, guru PKN (Pendidikan Kewargaan Negara) di SMPN (Sekolah Menengah Pertama Negeri) 19 Jakarta, juga mengatakan bahwa penyelenggaraan Kurikulum 2013 di sejumlah sekolah berjalan *mulus*, walaupun terdapat kesulitan, misalnya hal penilaian secara otentik. Namun, kendala itu hanya di awalnya saja. Penilaian otentik akan mudah apabila telah dipersiapkan sebelumnya, seperti membuat form khusus. Menurut Widiani, “[...] lama-lama akan terbiasa”; dan dia dengan para guru lainnya sepakat untuk mendukung pelaksanaan Kurikulum 2013 dan siap mempraktkannya dalam kegiatan belajar-mengajar (dalam *Kompas.com*, 13/8/2014).

Dengan latar belakang masalah di atas, peneliti mengajukan pertanyaan penelitian,

sebagai berikut: (1) bagaimana sebenarnya persepsi guru terhadap Kurikulum 2013?; (2) bagaimana sikap guru terhadap penundaan implementasi Kurikulum 2013?; serta (3) apakah penolakan terhadap Kurikulum 2013 didasari oleh alasan yang bersifat akademik atau ada faktor lainnya?

Untuk pertanyaan terakhir, yang dimaksud dari alasan yang bersifat akademik adalah alasan yang rasional, tidak bersifat emosional, tidak bersifat politis, dan tidak pula bersifat apologis terhadap ketidaksiapan guru untuk berubah dari kebiasaan lama.

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah ingin membuktikan sikap guru yang sesungguhnya terhadap kebijakan Kurikulum 2013, yakni apakah lebih suka melanjutkan Kurikulum 2013 atau lebih suka ditunda? Adapun rincian tujuan penelitian ini adalah: (1) ingin mengetahui persepsi guru terhadap Kurikulum 2013; (2) ingin mengetahui sikap guru terhadap penundaan implementasi Kurikulum 2013; serta (3) ingin menelusuri alasan penolakan responden terhadap Kurikulum 2013.

Temuan penelitian ini diharapkan bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis, paling tidak dalam tiga hal, sebagai berikut: *pertama*, bagi pengamat pendidikan diharapkan memperoleh perspektif lain yang lebih objektif. Banyak pihak yang tidak memiliki kapasitas dalam memahami permasalahan kurikulum turut beropini di media massa. Dengan hanya mendengar keluhan, mereka berani berkomentar sehingga semakin keluar dari konteks permasalahan. Sebut saja Gubernur DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang akrab dipanggil *Ahok*, berkomentar pedas terhadap Kurikulum 2013. Situs berita *Kompas.com*, pada hari Rabu, 13 Agustus 2014, pukul 15:24 WIB (Waktu Indonesia Barat), menurunkan berita tentang komentar *Ahok*, sebagai berikut:

Menurut saya, sekolah itu tempat bermain anak-anak. Jika (anak) dibebani dengan mata

pelajaran yang berlebihan, maka siswa *bakal* mengalami stres dan frustrasi berlebihan. Anak kecil sudah *kayak* kuli, langsung ditekan sama pelajaran-pelajaran yang bikin stres. Kasihan mereka, pulang sore-malam, saya *nggak* mengerti *deh* sama pola pendidikan sekarang (dalam *Kompas.com*, 13/8/2014).

Pernyataan tersebut walaupun (mungkin) ada benarnya, tetapi kurang bijak. Sebagai pejabat pemerintah, *Ahok* tidak boleh masuk pada wilayah pro-kontra kebijakan pemerintah itu sendiri. Jika beliau adalah ahli pendidikan, tentu saja sangat pantas karena sesuai kapasitasnya. Namun sayangnya, Basuki Tjahaja Purnama alias *Ahok* adalah seorang politikus, bukan seorang yang ahli tentang pendidikan.¹

Selain itu, banyak media yang mengangkat berita dengan mengambil alibi narasumber para peserta didik dan masyarakat awam. Para peserta didik diminta tanggapannya terhadap Kurikulum 2013. Jawaban para peserta didik, tentu saja, tidak dapat dijadikan rujukan, karena tanggapan mereka sangat relatif dan kadang tidak relevan. Apalagi pendapat mereka itu hanya berdasarkan pada persepsi yang terbatas. Peserta didik, misalnya, akan menjawab ketidaksukaannya berdasarkan pada perlakuan guru terhadap dirinya. Jika gurunya memperlakukan dirinya baik, maka pendapatnya akan baik. Sebaliknya, jika yang dirasakannya tidak nyaman, maka ia akan berpendapat negatif. Artinya, ketika ia berpendapat negatif, maka bukan karena Kurikulum 2013 yang jelek, tetapi karena perlakuan guru atas dirinya yang kurang baik.

Kedua, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan kurikulum nasional. Setiap negara berbeda dalam menetapkan kurikulum. Dengan adanya kontroversi Kurikulum 2013, sadar atau tidak sadar, kita telah memiliki pola dalam pengembangan kurikulum. Pada era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, misalnya, uji publik Kurikulum 2013

dilakukan melalui seminar dan membuka masukan lewat jejaring media sosial (Wijaya, 2015).² Di kemudian hari, pola ini tentu harus dievaluasi dan dicari pola lain yang dapat mendengar pendapat masyarakat. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperkaya khasanah keilmuan dalam pengembangan kurikulum.

Ketiga, bagi para praktisi pendidikan, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan refleksi dalam menyikapi setiap perubahan. Perubahan tidak dapat berjalan dari satu komponen tertentu, tetapi harus secara bersama-sama. Namun demikian, tidak berarti harus saling menunggu. Ketika tuntutan perubahan itu sangat mendesak, maka selayaknya guru dan sekolah dapat segera menyesuaikan diri terhadap perubahan dengan semangat pantang mundur.

TINJAUAN PUSTAKA

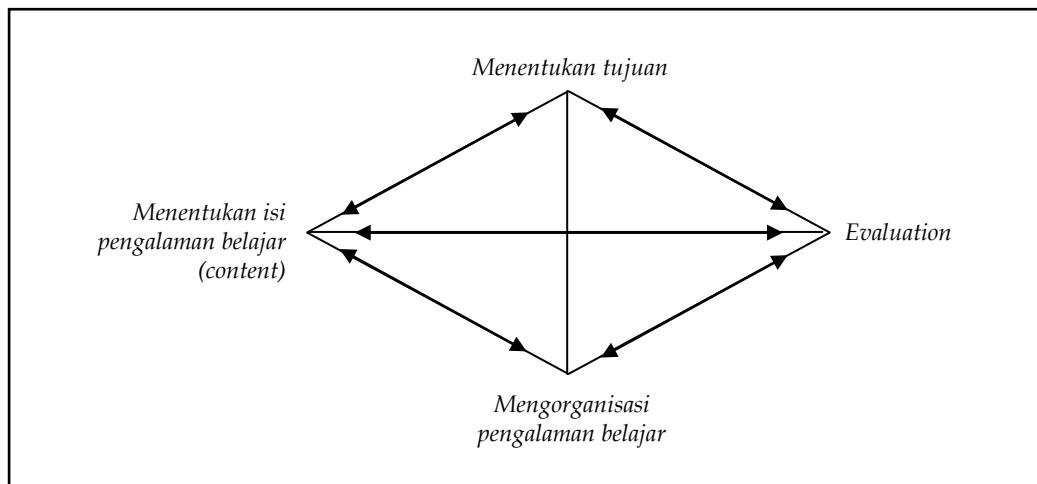
Tinjauan pustaka diarahkan untuk membangun landasan teori, sehingga dapat memahami analisis hasil penelitian. Selain itu diarahkan juga untuk memberi perspektif yang benar terhadap apa yang diperbincangkan oleh subjek penelitian, khususnya tentang Kurikulum 2013. Oleh karena bagian ini akan dibagi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

Pertama, **Perbedaan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013**. Sejak merdeka, Indonesia telah mengalami 10 kali perubahan kurikulum, yaitu Kurikulum 1947, Kurikulum 1952, Kurikulum 1964, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum 2004, Kurikulum 2006, dan Kurikulum 2013. Adapun pendekatan pengembangannya pernah mencoba empat bentuk. Hilda Karli (2014) merincinya sebagai berikut:

Kurikulum 1947 sampai dengan Kurikulum 2004 menggunakan kurikulum berbasis materi (*content-based curriculum development*); Kurikulum 2004 menggunakan pendekatan

²Lihat juga "Ini Penjelasan M. Nuh tentang Kurikulum 2013" dalam *KOMPAS.Com*. Jakarta: 4 Mei 2013. Tersedia secara online juga di: <http://edukasi.kompas.com/read/2013/05/04/21062649/Ini.Penjelasan.M.Nuh.Tentang.Kurikulum.2013> [diakses di Bandung, Indonesia: 28 Februari 2016].

¹Lihat, misalnya, "Siapa Ahok?". Tersedia secara online di: <http://ahok.org/tentang-ahok/siapa-ahok/> [diakses di Bandung, Indonesia: 28 Februari 2016].



Bagan 1:
Model Interaksi Komponen Kurikulum
(Sumber: Laurie Brady, 1990; dan Ahmad Yani, 2014)

KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi); Kurikulum 2006 disebut dengan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan); dan Kurikulum 2013 disebut *Standart Based Curriculum*. Perubahan kurikulum adalah sesuatu yang lumrah di setiap negara, karena masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi terus berkembang (Karli, 2014:86).

Sorimuda Nasution (2010) dan Ahmad Yani (2014) menyebutkan bahwa ada empat komponen pokok kurikulum, yaitu tujuan, bahan pelajaran, proses belajar-mengajar, dan penilaian. Keempat komponen tersebut, tentu saja, saling berkaitan satu sama lain sehingga mencerminkan satu kesatuan yang utuh sebagai program pendidikan (Nasution, 2010; dan Yani, 2014:8).

Lebih lanjut, Laurie Brady (1990) dan Ahmad Yani (2014) menggambarkan bahwa keempat komponen tersebut (tujuan, bahan pelajaran, proses belajar-mengajar, dan penilaian) dapat diilustrasikan dalam sebuah model, yang disebut "model interaksi" (Brady, 1990; dan Yani, 2014:44). Lihat bagan 1.

Memaknai kurikulum tidak hanya urusan mengatur mata pelajaran. Murni Eva Marlina (2013) menjelaskan bahwa untuk memahami konsep kurikulum, setidaknya ada tiga pengertian yang harus dipahami, yaitu: (1) kurikulum sebagai substansi atau sebagai suatu rencana belajar;

(2) kurikulum sebagai suatu sistem, yaitu bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, dan sistem masyarakat; serta (3) kurikulum sebagai suatu bidang studi, yaitu bidang kajian para ahli kurikulum dan pendidikan (Marlina, 2013:30). Pernyataan ini perlu diungkapkan, karena sering kali dikomentari secara tidak proporsional oleh para politisi di media massa.

Bagaimana perbedaan antara Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013? Jika dilihat dari empat komponen kurikulum, yaitu: tujuan, bahan pelajaran, proses belajar-mengajar, dan penilaian, sebenarnya tidak jauh berbeda, karena keduanya memiliki pendekatan yang sama. Pada buku pedoman *Bahan Uji Publik Kurikulum 2013*, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada tanggal 29 November 2012, ditegaskan bahwa Kurikulum 2013 akan melanjutkan pengembangan KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi), yang telah dirintis sejak tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu (Kemendikbud RI, 2012).

Beberapa perbedaan Kurikulum 2006 dengan Kurikulum 2013 yang diperdebatkan, antara lain: mengenai perumusan kompetensi, penyediaan bahan pembelajaran, proses pembelajaran, evaluasi, dan beban jam pelajaran. Masing-masing

penjelasannya adalah sebagai berikut:

Mengenai Perumusan Kompetensi. Dalam Kurikulum 2006, perumusan kompetensi hasil belajar dikenal dengan istilah SK (Standar Kompetensi) dan KD (Kompetensi Dasar). Dalam Kurikulum 2013, rumusan kompetensi hasil belajar menggunakan KI (Kompetensi Inti) dan KD (Kompetensi Dasar). KI setiap jenjang menunjukkan gradasi yang terus meningkat; dan pada setiap mata pelajaran dirumuskan secara seragam. Permendikbud RI (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah menyebut KI sebagai kompetensi yang bersifat generik dan mencakup 3 ranah, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan (Kemendikbud RI, 2013a).

Ranah sikap pula dipilih menjadi sikap spiritual dan sikap sosial. Pemilahan ini diperlukan untuk menekankan pada pentingnya keseimbangan antara aspek spiritual dan aspek sosial, sebagaimana diamanatkan dalam Tujuan Pendidikan Nasional (Depdiknas RI, 2003; dan Setneg RI, 2005). Dengan demikian, kompetensi yang bersifat generik terdiri atas 4 dimensi saja, yaitu: KI-1 berkenaan dengan "kompetensi sikap spiritual", KI-2 berkenaan dengan "sikap sosial", KI-3 berkenaan dengan "pengetahuan", dan KI-4 berkenaan dengan "keterampilan". Dalam proses perumusan KD, di dalamnya terdapat proses *selecting learning experiences*, yang dipilih sesuai dengan perkembangan jaman dan kebutuhan peserta didik (Kemendikbud RI, 2013a).

Mengenai Penyediaan Bahan Pembelajaran. Penyediaan bahan pembelajaran, khususnya buku siswa, pada Kurikulum 2006 disediakan oleh masyarakat atau penerbit. Ada dua kebijakan yang pernah digunakan, yaitu awal Kurikulum 2006, buku diterbitkan dan dijual oleh penerbit ke sekolah-sekolah. Peserta didik dapat membeli lewat guru dan koperasi sekolah dengan harga pasar. Pada tahun 2009, pemerintah membuat kebijakan baru dengan membuat BSE (Buku Sekolah Elektronik). Penerbit dan/atau perorangan dapat membuat naskah buku yang "dijual" kepada pemerintah. Selanjutnya, pemerintah

mengunggah (*upload*) menjadi BSE (Harahap, 2010).

Adapun kebijakan pada Kurikulum 2013, buku dicetak dan didistribusikan oleh pemerintah ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia secara gratis. Penyediaan buku siswa dan buku guru ini diatur melalui Permendikbud RI Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikbud RI, 2013b).

Mengenai Proses Pembelajaran. Proses pembelajaran (*learning activities*) dalam Kurikulum 2006 menggunakan langkah pembelajaran EEK (Eksplorasi, Elaborasi, dan Konfirmasi); sedangkan pada Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan Saintifik, yakni pembelajaran yang membangkitkan minat siswa untuk melakukan 5 M (Mengamati, Menanya, Mencari data, Mengasosiasi, dan Mengkomunikasikan), yang didukung dengan pendekatan inkuri dan diskoveri (Kemendikbud RI, 2013c; dan Marlina, 2013).

Mengenai Evaluasi. Pada Kurikulum 2006 hanya menekankan pada aspek kognitif dengan bentuk instrumen berupa tes (Hasan, 2007; dan Sanjaya, 2010). Kurikulum 2013 menggunakan sistem evaluasi otentik yang diatur melalui Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Instrumen penilaiannya sangat beragam, yaitu berupa instrumen observasi, penilaian diri (*self assessment*), penilaian teman sebaya (*peer assessment*), dan penilaian jurnal (*anecdotal record*). Instrumen penilaian pengetahuan terdiri dari tes tulis, observasi terhadap diskusi, dan penugasan. Aspek penilaian keterampilan, antara lain, dalam bentuk test unjuk kerja atau praktek, proyek, produk, portofolio, dan tertulis, seperti menulis laporan atau bentuk tulisan lainnya (Kemendikbud, 2014b).

Mengenai Beban Jam Pelajaran. Beban jam pelajaran pada Kurikulum 2006 lebih singkat daripada Kurikulum 2013. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 yang merupakan perbandingan beban belajar antara Kurikulum 2006 dengan Kurikulum 2013.

Tabel 1:
 Perbandingan Beban Belajar antara Kurikulum 2006 dengan Kurikulum 2013

Kurikulum	SD/MI					SMP/MTs				SMA/MA		
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
K-2006	26	27	28	32	32	32	32	32	32	38	39	39
K-2013	30	32	34	36	36	36	38	38	38	42	44	44

Keterangan: Alokasi waktu per satu JP (Jam Pelajaran) untuk SD/MI (Sekolah Dasar/*Madrasah Ibtidaiyah*) = 35 menit; SMP/MTs (Sekolah Menengah Pertama/*Madrasah Tsanawiyah*) = 40 menit; dan SMA/MA (Sekolah Menengah Atas/*Madrasah Aliyah*) = 45 menit.

Tabel 2:
 Perbandingan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013

Kurikulum 2006	Kurikulum 2013
SK (Standar Kompetensi) dan KD (Kompetensi Dasar) setiap mata pelajaran berbeda.	KI (Kompetensi Inti) setiap mata pelajaran sama, tetapi KD (Kompetensi Dasar) berbeda. KI dibedakan antara KI-1 berkenaan dengan Sikap Spiritual, KI-2 berkenaan dengan Sikap Sosial, KI-3 berkenaan dengan Pengetahuan, dan KI-4 berkenaan dengan Keterampilan.
Silabus dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) disusun oleh guru. Indikator dikembangkan dari KD yang tersedia.	Silabus disusun oleh pemerintah dan hanya RPP disusun oleh guru.
Pembelajaran menggunakan langkah EEK (Eksplorasi, Elaborasi, dan Konfirmasi) dengan pendekatan kontekstual.	Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Saintif, yang mencakup 5 M (Mengamati, Menanya, Mencari data, Mengasosiasi, dan Mengkomunikasikan) yang didukung dengan pendekatan inkuri dan diskoveri.
Pembelajaran menekankan pada aspek kognitif, afeksi, dan psikomotor, namun dalam pelaksanaannya masih pada kognitif saja.	Pembelajaran menekankan pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada proses pembelajaran, guru dituntut untuk mengamati sikap siswa sebagai <i>nurturant effect</i> dari proses pembelajaran.
Penilaian hanya menekankan pada aspek kognitif dengan jenis instrumen berupa tes.	Penilaian mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan jenis instrumen berbagai bentuk, yaitu tes dan non-tes.

Dari uraian dan penjelasan di atas, maka perbandingan (dimana didalamnya ada persamaan dan perbedaan) antara Kurikulum 2006 dengan Kurikulum 2013 dapat dirangkum dalam tabel 2.

Kedua, Peranan Media Massa dalam Pembentukan Opini Publik. Berdasarkan orientasinya, pers dan/atau media massa terbagi atas empat kategori, yaitu pers yang otoriter, liberal, tanggung jawab sosial, dan totaliter model Uni Sovyet (Siebert *et al.*, 1986). Dalam konteks ini, Burhan Bugin (2013) menjelaskan perbedaan keempatnya, yakni bahwa "pers otoriter" memiliki fungsi mendukung dan menjadi kepanjangan tangan kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa dan sifatnya melayani negara. "Pers liberal" memiliki orientasi untuk menemukan kebenaran dan mengawasi pemerintah, sekaligus sebagai media yang

memberikan informasi, menghibur, dan mencari keuntungan atau bisnis. "Pers tanggung jawab sosial" selain bertujuan untuk memberikan informasi, menghibur, mencari keuntungan (seperti teori liberal), juga bertujuan untuk *membawa* konflik ke dalam arena diskusi. Adapun "pers totaliter model Uni Soviet" memiliki tujuan utama untuk membantu keberhasilan dan kelangsungan suatu sistem atau rejim, seperti di negara Uni Soviet. Media dikontrol oleh tindakan ekonomi dan politik dari pemerintah yang berkuasa, sehingga hanya anggota partai sajalah yang bisa menggunakan media secara regular (Bugin, 2013:293-295).

Dari empat kategori pers di atas, semuanya dapat dikendalikan oleh pemerintah, orang-orang kaya, dan para pemilik media. Sebagai pihak yang berkuasa

dan memiliki uang, ketiga pihak tersebut memiliki peluang untuk mengarahkan opini publik yang dihendakinya. Sementara itu, masyarakat atau publik adalah pihak yang "tidak berdaya", karena tidak memiliki informasi lain selain versi media yang didengarnya. Dengan demikian, media dapat mengarahkan, memanipulasi, bahkan menggiring pada suatu tindakan sosial, ekonomi, atau politik sesuai kepentingan pemerintah, para pemilik modal, dan pengelola media (cf Hamad, 2003; Putri, 2015; dan Suwirta, 2015).

Dalam pembentukan opini, W. Morissan (2013) menjelaskan bahwa media massa memiliki tiga sifat yang berperan dalam membentuk opini publik, yaitu *ubiquity* (ubiquity), kumulatif (*cumulativeness*), dan konsonan (*consonant*). Ubiquitas artinya bahwa media merupakan sumber informasi yang sangat luas dan menjadi instrumen yang sangat penting, diandalkan, dan selalu tersedia ketika orang membutuhkan informasi. Sifat kumulatif yaitu sifat media yang dapat diulang-ulang sesuai keinginan. Pengulangan terjadi di sepanjang program, baik pada satu media tertentu ataupun pada media lainnya, dan baik yang sejenis maupun tidak (Morissan, 2013:531).

W. Morissan (2013), dengan mengutip Elisabeth Noelle-Neumann (2009), menyebutkan bahwa pengulangan menimbulkan dampak *reciprocal influence in building up frame of reference* atau "pengaruh timbal-balik dalam membangun kerangka acuan" (Noelle-Neumann, 2009; dan Morissan, 2013). Adapun sifat konsonan yaitu bahwa media akan melakukan penegasan dan/atau melakukan konfirmasi terhadap pemikiran dan pendapat mereka sendiri; dan menjadikan pemikiran dan pendapat tersebut seolah-olah berasal dari masyarakat (Morissan, 2013:532).

Proses pembentukan opini publik tidak terlepas dari teori kultivasi dari George Gerbner (dalam Nurudin, 2007). Kultivasi adalah teori komunikasi massa untuk memprediksi pembentukan persepsi, sikap, dan kepercayaan tentang sesuatu hal sebagai hasil penerimaan informasi dari media dalam jangka panjang (Nurudin,

2007). Dalam konteks ini, kembali W. Morissan (2010) menjelaskan bagaimana media, khususnya TV (*Television*) mampu memengaruhi penonton? Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor "kultivasi" yang dibentuk oleh pola *mainstreaming* dan *resonance* (Morissan, 2010:259).

Mainstreaming adalah proses mengikuti arus utama yang terjadi ketika berbagai simbol, informasi, dan ide yang ditayangkan oleh TV mendominasi dan mengalahkan simbol, informasi, dan ide yang berasal dari sumber lain, sehingga pendapat audien menjadi homogen. Para penonton TV akan memiliki orientasi, perspektif, dan makna yang sama satu sama lain. Sedangkan *resonance* terjadi ketika informasi yang disajikan oleh TV sama dengan realitas aktual masyarakat sehari-hari yang dihadapi penonton. Fungsi media sebagai resonansi adalah "menggemakan" realitas masyarakat, sehingga terdengar *heboh* atau penting (Morissan, 2010:260).

Oleh siapa *mainstreaming* dan *resonance* itu dimainkan? Keduanya dapat dimainkan oleh penguasa dan pemilik media massa. Dalam konteks ini, W. Morissan, A. Corry & F. Hamid (2010), dengan mengutip Stephen W. Littlejohn & Karen A. Foss (2009), mengelompokkan empat tipe hubungan antara penguasa dan media massa, yaitu: (1) *high-power source, high-power media*, yaitu ketika para pejabat pemerintah memiliki hubungan yang dekat dengan para pengelola atau pemilik media massa, yang jika hal ini terjadi maka akan memberi pengaruh yang besar terhadap agenda publik; (2) *high-power source, low-power media*, yaitu ketika pemerintah menguasai kekuatan media, dan pemerintah memungkinkan untuk mengkooptasi media, misalnya dengan cara membeli waktu tayang atau *airtime* untuk kepentingan tertentu; (3) *lower-power source, high-power media*, yaitu ketika media memiliki kekuatan yang besar untuk menentukan agenda publiknya, dan media dapat mengabaikan atau tidak memberitakan atau mengurangi intensitas pemberitaannya; serta (4) *low-power source, low-power media*, yaitu jika keduanya dalam keadaan lemah, maka agenda publik akan

ditentukan oleh peristiwa itu sendiri dan bukan ditentukan oleh media atau para pemimpin politik (Littlejohn & Foss, 2009; dan Morissan, Corry & Hamid, 2010:48).

Kekuatan media tidak hanya mampu menyampaikan informasi, tetapi juga mempengaruhi sikap masyarakat (Hamad, 2003; Putri, 2015; dan Suwirta, 2015). Sikap terbentuk akibat persepsi selektif yang dipengaruhi oleh kebutuhan dan motivasi penerima pesan. Dalam konteks ini, Werner J. Severin & James W. Tankard (2014) mengatakan bahwa persepsi selektif adalah kecenderungan persepsi manusia yang dipengaruhi oleh keinginan-keinginan, kebutuhan-kebutuhan, sikap-sikap, dan faktor-faktor psikologi lainnya. Orang yang berbeda dapat menanggapi pesan yang sama dengan cara yang berbeda, dan tidak ada seorang komunikator pun yang dapat mengasumsikan bahwa sebuah pesan akan mempunyai ketepatan makna untuk semua penerima pesan (Severin & Tankard, 2014:83).

Namun demikian, para pemilik media massa menyadari bahwa opini dapat dibentuk dengan cara menentukan masalah yang dianggap penting atau menarik bagi masyarakat. Untuk itu, seringkali media menciptakan kontroversi terhadap suatu topik (Morissan, 2013:526). Dengan cara ini, khalayak dibuat *galau* dengan berbagai macam informasi, sehingga pada akhirnya “mengalah” kepada media yang berhasil memanipulasinya.

Kita tidak dapat menentukan perubahan sikap sebagai hasil dari komunikasi massa, kecuali praduga saja dengan melihat ciri-cirinya. Dalam konteks ini, W. Morissan (2013), sekali lagi, menunjukkan teori spiral kebisuan (*spiral of silence*), yang mengatakan bahwa pandangan kelompok minoritas (berbeda dengan pendapat pada umumnya) akan cenderung menahan diri untuk mengemukakan pandangannya; sebaliknya, mereka yang meyakini bahwa pandangannya mewakili mayoritas akan cenderung mengemukakannya kepada orang lain (Morissan, 2013:526).

Asumsi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pemilik media untuk

terus membangun opini dengan gencar melalui berbagai media massa yang berbeda, tetapi dengan pendapat yang seragam. Dengan cara ini pula, khalayak minoritas terus terpojok oleh pendapat mayoritas yang diresonansikan oleh media massa.

Terkait dengan penolakan terhadap Kurikulum 2013, semua teori yang dijelaskan di atas memiliki kesesuaian dengan peran media massa dalam pembentukan opini penolakan. Persepsi selektif yang dibangun ditujukan agar khalayak menerima alasan keterlambatan distribusi buku siswa sebagai sebuah kegagalan Kurikulum 2013 secara total. Jika mengacu pada pendapat Stephen W. Littlejohn & Karen A. Foss (2009) dan W. Morissan, A. Corry & F. Hamid (2010), kasus penundaan Kurikulum 2013 merupakan tipe hubungan penguasa dan media dalam interaksi *high-power source and high-power media*, yaitu ketika para pejabat pemerintah memiliki kepentingan dan secara bersamaan juga dekat dengan para pemilik media massa (Littlejohn & Foss, 2009; dan Morissan, Corry & Hamid, 2010).

Selain itu, teori kultivasi yang berupa *mainstreaming* dan *resonance* juga dimainkan oleh mereka yang memiliki kepentingan ekonomi (Morissan, 2010). Para guru, yang juga penulis buku siswa Kurikulum 2006 di sejumlah penerbit, menjadi pendukung penolakan Kurikulum 2013; dan sebagian dari mereka kelihatannya sudah nyaman dengan Kurikulum 2006, sebagai zona aman (*cf* Hamalik, 2007; dan Hasan, 2008).

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian. Penelitian ini menggunakan metode survey. Penelitian dengan metode survey memiliki keunggulan tertentu. Dalam konteks ini, Donald Ary *et al.* (2010) mengatakan, sebagai berikut:

[...] in survey research, investigators ask questions about peoples' beliefs, opinions, characteristics, and behavior. The survey questionnaire is widely used as a source of data in studies in sociology, business, psychology, political science, and education. [...]

A survey researcher may want to investigate associations between respondents' characteristics, such as age, education, social class, race, and their current attitudes toward some issue (Ary *et al.*, 2010:372).

Tabel 3:
Jumlah Resonden yang Terjaring

Jenjang Sekolah	Bersertifikat Profesi		Belum Bersertifikat Profesi		Jumlah	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	f	%
PAUD/RA	1	1	0	2	4	1.23
SD/MI	24	15	19	8	66	20.37
SMP/MTs	54	29	13	11	107	33.02
SMA/SMK/MA	43	30	18	16	107	33.02
Pengawas Sekolah	16	3	0	0	19	5.86
Staf Dinas Pendidikan	5	2	1	0	8	2.47
Lainya	3	0	5	5	13	4.01
Jumlah	146	80	56	42	324	100.00

Keterangan: Resonden tersebar di 20 Provinsi, yaitu: Aceh, Bangka-Belitung, Banten, Bengkulu, DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Lampung, NTT (Nusa Tenggara Timur), Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.

Tabel 4:
Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Ruang Lingkup	Indikator
Persepsi terhadap kebijakan Kurikulum 2013.	(1) Keunggulan Kurikulum 2013. (2) Kelemahan Kurikulum 2013. (3) Penundaan Kurikulum 2013. (4) Keberatan guru terhadap Kurikulum 2013.
Harapan guru dalam melaksanakan tugas.	(1) Jumlah JP (Jam Pelajaran) yang layak bagi guru. (2) Pendekatan pembelajaran yang disukai oleh guru. (3) Sistem penilaian yang disukai oleh guru. (4) Lama belajar siswa di sekolah yang dianggap ideal. (5) Pihak penyedia buku siswa.

Terjemahan:

[...] dalam penelitian survei, peneliti mengajukan pertanyaan tentang keyakinan masyarakat, opini, karakteristik, dan perilaku. Kuesioner survei secara luas digunakan sebagai sumber data dalam penelitian di bidang sosiologi, bisnis, psikologi, ilmu politik, dan pendidikan. [...]

Seorang peneliti survei mungkin ingin menyelidiki hubungan antara karakteristik responden, seperti usia, pendidikan, kelas sosial, ras, dan sikap mereka saat ini terhadap beberapa masalah.

Dengan pemahaman ini, peneliti memiliki keyakinan bahwa penelitian yang dilakukan telah relevan dengan metode survey ini.

Populasi dan Sampel. Populasi penelitian adalah Guru dan Pengawas pada semua jenjang yang memiliki akun jejaring sosial, khususnya FB (*Face Book*) di Indonesia. Teknik sampling adalah *accidental sampling*, yaitu sampel yang diambil tanpa direncanakan lebih dahulu (Hertono,

1977). Namun demikian, karena kriteria sampel telah ditetapkan, maka responden yang terjaring adalah Guru dan Pengawas dari semua jenjang PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), dan SMA/SMK (Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan) di seluruh Indonesia.

Jumlah sampel yang telah terkumpul adalah 355 orang, namun yang lengkap mengisi instrumen adalah 324 orang. Lihat tabel 3.

Prosedur Penelitian. Prosedur penelitian dalam survey mengacu pada pendapat Donald Ary *et al.* (2010), yaitu: (1) *Planning*, yakni merencanakan penelitian dengan mempertimbangkan urgensi, rasional, dan pentingnya penelitian dilakukan; (2) *Defining population*, yakni mendefinisikan populasi penelitian, dimana dalam penelitian ini populasinya adalah guru semua jenjang di Indonesia; (3) *Sampling*, yakni representasi

dari populasi; (4) *Constructing the instrument*, yakni instrumen yang dikembangkan adalah kuesioner, yang dipadukan dengan skala sikap; (5) *Conducting the survey*, yakni melaksanakan survey lewat jejaring sosial, terutama FB atau *Face Book*, dalam rentang waktu dua minggu; serta (6) *Processing the data*, yakni langkah terakhir yang mencakup *coding* data, analisis statistik, menafsirkan hasil, dan melaporkan temuan (Ary *et al.*, 2010:378-379).

Instrumen dan Metode Pengumpulan Data. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner dan skala sikap. Ruang lingkup pertanyaan yang diajukan adalah sebagaimana nampak dalam tabel 4.

Pengumpulan data, sebagaimana telah dijelaskan, adalah menjangkau responden melalui jejaring sosial, terutama FB (*Face Book*), yang disebarkan secara berantai antar responden. Manakala pengolahan data dilakukan melalui tabulasi frekwensi; dan analisis data adalah melalui analisis deskriptif (*cf* Hasan, 2002; Witarto, 2008; dan Sugiyono, 2010).

HASIL PENELITIAN

Pihak yang menolak Kurikulum 2013, dengan alasan karena buku siswa belum terdistribusi dan sistem penilaian otentik yang dianggap rumit, menurut penulis, terlalu dibesar-besarkan. Guru masih dapat melanjutkan pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber buku lain dan tidak tergantung pada satu sumber buku siswa. Guru juga dapat berlatih mengembangkan instrumen dan menggunakannya untuk penilaian otentik. Untuk berlatih memang dibutuhkan waktu yang cukup; dan mereka dapat meluangkan waktunya untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dalam proses penilaian otentik.

Jika didasarkan pada dua hal ini atas, maka tidak bijak jika kita berpendapat bahwa distribusi buku yang belum merata dan sulitnya sistem penilaian otentik serta-merta diangkat sedemikian rupa sehingga menjadi opini publik, seolah-olah Kurikulum 2013 secara keseluruhan sangat tidak sempurna. Jika tidak karena unsur

politis, maka mengatasi permasalahan Kurikulum 2013 dapat disederhanakan, yaitu dengan memperbaiki komponen-komponen tertentu saja yang dianggap masih lemah.

Komponen kurikulum yang masih bisa dipertahankan dan dilanjutkan, misalnya, komponen tujuan, konten kurikulum (struktur kurikulum), dan metode pembelajaran (metode saintifik). Sedangkan komponen yang perlu diatur ulang adalah sistem penilaian. Untuk membuktikan hipotesis di atas, peneliti mencoba melakukan survey kepada guru sebagai pribadi, dan bukan sebagai komunitas organisasi guru.

Pertama, Persepsi Guru terhadap Kurikulum 2013. Persepsi guru terhadap Kurikulum 2013 digali informasinya dengan mengajukan keunggulan dan kelemahan kurikulum. Nilai rata-rata pendapat keunggulan dikurangi nilai rata-rata pendapat kelemahan, sehingga hasilnya menunjukkan kecenderungan sikap responden.

Dari jumlah responden 324 orang, terdapat 109 orang (33.64%) yang cenderung memiliki persepsi negatif; 32 orang (9.88%) ragu-ragu; dan 183 orang (56.48%) cenderung memiliki persepsi positif. Grafik 1 adalah gambaran persepsi guru terhadap Kurikulum 2013.

Grafik 1 menunjukkan bahwa guru mengakui keunggulan Kurikulum 2013. Keunggulan yang diakui guru, antara lain, pada konten kurikulum, yaitu menjanjikan peserta didik untuk siap menghadapi pasar bebas dan mengatasi problematika kehidupan; menyiapkan peserta didik untuk mampu mengikuti kemajuan teknologi informasi; mampu mengembangkan industri kreatif; serta dapat membina peserta didik untuk memiliki karakter, bersikap terbuka, toleran, ulet, bekerja keras, dan memiliki minat yang besar untuk mencapai tujuan hidup.

Kelemahan Kurikulum 2013, antara lain, dapat merepotkan peserta didik karena banyak tugas belajar, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk bermain; menuntut biaya tinggi; sangat menyita waktu; dan

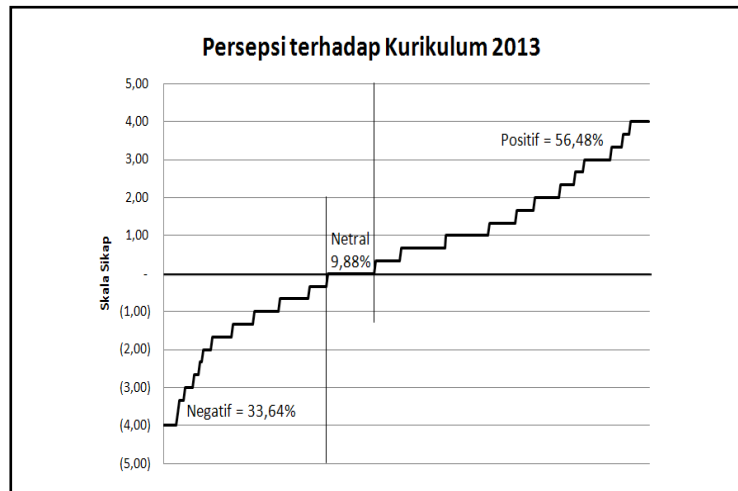
menjadi beban kerja bagi guru. Kelemahan lainnya yang bersifat teknis adalah distribusi buku siswa yang belum merata; dan kompetensi guru yang belum memadai untuk melaksanakan Kurikulum 2013.

Kedua, Sikap Guru terhadap Penundaan Kurikulum 2013. Ada empat pertanyaan yang diajukan untuk mengetahui sikap guru terhadap penundaan Kurikulum 2013. Pertanyaan pertama adalah apakah penundaan Kurikulum 2013 merupakan bentuk kebijakan pemerintahan Joko Widodo – JK (Jusuf Kalla) yang populer? Jawaban responden menunjukkan sikap yang bervariasi. Jawaban Sangat Tidak Setuju ada 74 orang (22.8%), Tidak Setuju ada 64 orang (19.8%), Ragu-ragu ada 95 orang (29.3%), Setuju ada 48 orang (14.8%), dan Sangat Setuju ada 42 orang (13.0%).

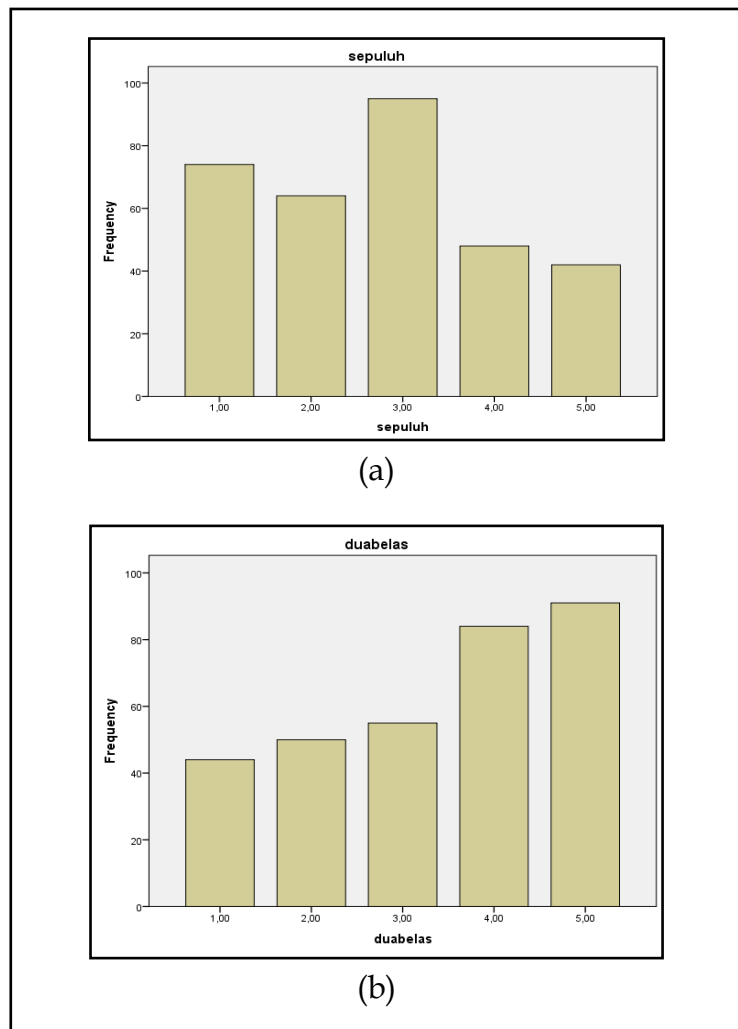
Jika dikelompokkan, pola jawaban responden yang cenderung Tidak Setuju ada 138 orang (42.6%) *versus* yang setuju ada 90 orang (27.8%). Grafik 2(a) menunjukkan frekwensi pendapat responden bahwa penundaan Kurikulum 2013 adalah kebijakan yang “kurang populer” dan “kurang baik” dari pemerintahan Jokowi – JK.

Pertanyaan kedua menyangkut kekecewaan responden terhadap penundaan Kurikulum 2013. Responden yang menyatakan Sangat Tidak Setuju atau Tidak Kecewa ada 44 orang (13.6%), Tidak Setuju ada 50 orang (15.4%), Ragu-ragu ada 55 orang (17.0%), yang merasa Setuju ada 84 orang (25.9%), dan merasa Sangat Setuju terhadap pernyataan (bahwa dirinya sangat kecewa) ada 91 orang (28.1%).

Dengan data di atas, pola jawaban responden adalah merasa



Grafik 1:
Kecenderungan Persepsi Responden Guru terhadap Kurikulum 2013



Grafik 2:
Grafik 2(a) Menunjukkan bahwa Penundaan Kurikulum 2013 sebagai suatu Kebijakan yang Negatif; dan Grafik 2(b) Menunjukkan Kekecewaan terhadap Penundaan Kurikulum 2013.

Tabel 5:
 Alasan Penolakan Kurikulum 2013

No	Kurikulum 2013 Layak DITOLAK karena ...		STS	TS	R	S	SS
1	Tidak memberi ruang kreativitas bagi guru.	%	101 31.2	78 24.1	72 22.2	39 12.0	34 10.5
2	Dipaksakan, terburu-buru, dan hanya proyek.	%	56 17.3	53 16.4	64 19.8	53 16.4	98 30.2
3	Guru belum siap melaksanakannya.	%	55 17.0	67 20.7	78 24.1	60 18.5	64 19.8
4	Menghabiskan anggaran, padahal tidak menjamin meningkatkan kualitas pendidikan.	%	75 23.1	77 23.8	71 21.9	51 15.7	50 15.4

Keterangan: STS = Sangat Tidak Setuju, TS = Tidak Setuju, R = Ragu-ragu, S = Setuju, dan SS = Sangat Setuju.

kecewa terhadap kebijakan penundaan Kurikulum 2013, karena dianggap suatu pemborosan biaya (khususnya anggaran yang telah dikeluarkan untuk pelatihan guru). Perhatikan pula grafik 2(b).

Pertanyaan ketiga yang diajukan adalah apakah penundaan Kurikulum 2013 adalah wujud kebijakan yang populer dari pemerintahan Jokowi - JK (Jusuf Kalla)? Jawaban responden menunjukkan Sangat Tidak Setuju ada 61 orang (18.8%); Tidak Setuju ada 57 orang (17.6%); Ragu-ragu ada 97 orang (29.9%); Setuju ada 54 orang (16.7%); dan Sangat Setuju ada 55 orang (17.0%). Dengan melihat proporsi jawabannya, responden terbagi secara merata, namun cenderung menyatakan Tidak Setuju. Jika ditafsirkan maka dapat disimpulkan bahwa responden tidak menganggap kebijakan penundaan Kurikulum 2013 sebagai sesuatu kebijakan yang populer dari pemerintahan Jokowi - JK.

Pertanyaan keempat yang diajukan adalah untuk menggali informasi, apakah penundaan Kurikulum 2013 menimbulkan kebingungan, karena tidak ada kriteria yang jelas dalam menentukan sekolah pelaksana Kurikulum 2013? Jawaban responden yang Sangat Tidak Setuju (artinya tidak merasa bingung) ada 27 orang (8.3%); Tidak Setuju ada 44 orang (13.6%); Ragu-ragu ada 76 orang (23.5%); Setuju ada 84 orang (25.9%); dan Sangat Setuju (artinya sangat membingungkan) ada 93 orang (28.7%).

Ketiga, Timbangan atas Penolakan Kurikulum 2013. Ada empat alasan penolakan responden terhadap Kurikulum

2013. Pola pendapat responden tersebut dapat dilihat dalam tabel 5.

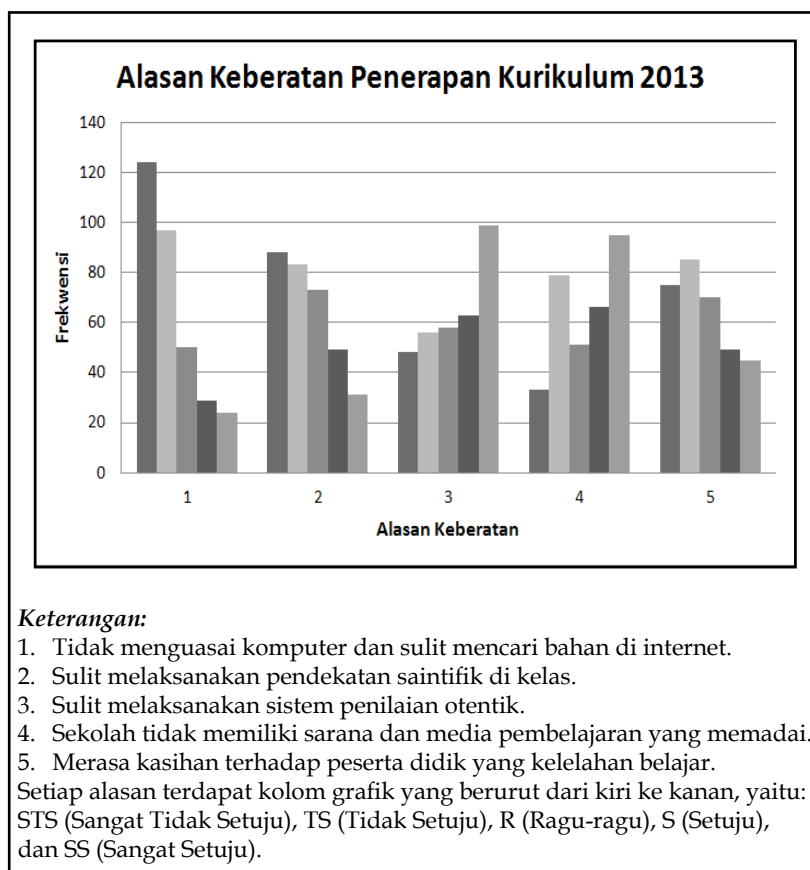
Dengan melihat pola jawabannya, responden tidak setuju jika penolakan Kurikulum 2013 didasarkan pada alasan "tidak memberi ruang kreativitas bagi guru". Artinya, Kurikulum 2013 memberi peluang terhadap kreativitas guru dalam pembelajaran. Pola jawaban kedua, responden setuju bahwa Kurikulum 2013 layak ditolak karena "dikembangkan secara terburu-buru, dipaksakan, dan hanya proyek semata". Pola jawaban ketiga cenderung ragu-ragu. Artinya, guru "ragu-ragu terhadap kesiapannya menghadapi Kurikulum 2013". Pola jawaban keempat, responden cenderung tidak setuju, yang artinya secara tidak langsung mereka ingin mengatakan bahwa Kurikulum 2013 sebenarnya "memiliki jaminan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, walaupun harus menghabiskan anggaran dalam jumlah yang tidak sedikit".

Penelusuran yang paling penting adalah pendapat guru yang diarahkan pada kecenderungan sikap guru terhadap perubahan dan kesiapan menghadapi berbagai kesulitan dalam menjalankan Kurikulum 2013. Pernyataan skala sikap yang diajukan adalah apakah guru sudah "nyaman" dengan Kurikulum 2006? Pola jawaban responden adalah Ragu-ragu dengan ekor grafik di sebelah kiri (Tidak Setuju) dan di sebelah kanan (Setuju) cukup berimbang. Kelompok yang Tidak Setuju ada 115 orang (35.5%); Ragu ragu ada 94 orang (29%); dan kelompok Setuju ada 115 orang (35.4%).

Penulis memiliki penafsiran bahwa guru “belum banyak tahu tentang Kurikulum 2013, sehingga sulit mengukur *kenyamanan* antara melaksanakan Kurikulum 2006 atau Kurikulum 2013”. Lihat grafik 3.

Dari grafik 3 dapat dijelaskan bahwa guru keberatan terhadap alasan penundaan Kurikulum 2013. *Pertanyaan pertama*, apakah guru keberatan terhadap Kurikulum 2013 karena tidak menguasai komputer dan sulit mencari bahan di internet? Pola jawabannya menunjukkan keberatan. Artinya, guru tidak memandang penggunaan komputer sebagai suatu hambatan dalam melaksanakan Kurikulum 2013. Jika digabungkan antara jawaban STS (Sangat Tidak Setuju) dan TS (Tidak Setuju) ada 221 orang (68.2%); sedangkan gabungan dari jawaban S (Setuju) dan SS (Sangat Setuju) hanya 55 orang (16.4%).

Pertanyaan kedua, apakah guru keberatan terhadap Kurikulum 2013, karena sulit melaksanakan pendekatan saintifik di kelas? Jawaban responden adalah Tidak Setuju, artinya guru tidak memperlakukan pendekatan saintifik. Mereka merasa mampu melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Jika digabungkan antara jawaban STS dan TS ada 171 orang (52.8%); sedangkan gabungan dari jawaban S dan SS terdapat 88 orang (24.7%). Hal ini relevan dan diperkuat dengan jawaban lainnya. Responden ternyata sangat menyukai pendekatan saintifik. Dari 324 responden, terdapat 148 orang (45.7%) menyukai pendekatan Saintifik dalam Kurikulum 2013, dibandingkan dengan pendekatan EEK (Eksplorasi, Elaborasi, dan Konfirmasi) dan PAIKEM (Pembelajaran



Grafik 3:
Alasan Keberatan Penerapan Kurikulum 2013

Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan) dalam Kurikulum 2006.

Pertanyaan ketiga, apakah guru keberatan terhadap Kurikulum 2013, karena sulit melaksanakan sistem penilaian otentik? Pola jawabannya menunjukkan pembenaran terhadap pertanyaan yang diajukan. Guru merasa mengalami kesulitan dalam melaksanakan penilaian otentik. Jika digabungkan antara jawaban STS dan TS ada 104 orang (32.1%); sedangkan gabungan dari jawaban S dan SS terdapat 162 orang (50.0%). Untuk itu, responden berharap agar penilaian otentik pada Kurikulum 2013 lebih disederhanakan. Usulan penyederhanaan penilaian otentik Kurikulum 2013 disarankan oleh 203 orang (62.7%) mengalahkan pendapat yang menyarankan kembali kepada Kurikulum 2006 atau KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), yaitu hanya 38 orang (11.7%).

Pertanyaan keempat, apakah guru keberatan terhadap Kurikulum 2013, karena sekolah tidak memiliki sarana dan media pembelajaran yang memadai? Pola jawabannya cenderung membenarkan. Jika digabungkan antara jawaban STS dan TS ada 112 orang (34.6%); sedangkan gabungan dari jawaban S dan SS terdapat 161 orang (49.7%).

Pertanyaan kelima, apakah guru keberatan terhadap Kurikulum 2013, karena merasa kasihan terhadap peserta didik yang kelelahan belajar? Pola jawabannya menolak. Artinya, lama belajar siswa di sekolah bukan alasan penolakan terhadap Kurikulum 2013. Jika digabungkan antara jawaban STS dan TS ada 160 orang (49.4%); sedangkan gabungan dari jawaban S dan SS terdapat 94 orang (29.0%).

PEMBAHASAN

Pada bagian ini, penulis akan membahas sejumlah temuan penelitian yang dianggap penting berdasarkan perspektif budaya dan/atau sosial-politik. Hasil temuan *pertama* menunjukkan bahwa persepsi guru terhadap Kurikulum 2013 adalah positif. Persepsi ini berbeda pendapat dengan organisasi guru, baik dari FSGI (Federasi Serikat Guru Indonesia) maupun PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia). Kesenjangan pendapat ini menunjukkan adanya unsur media yang mengangkat isu yang tidak didasarkan pada kecenderungan pendapat umum. Jika isu yang diusung oleh FSGI dan PGRI adalah benar, maka guru (sebagian besar guru) seharusnya memiliki persepsi yang negatif terhadap Kurikulum 2013; namun faktanya, guru memiliki persepsi yang baik terhadap Kurikulum 2013.

Hasil temuan *kedua* didukung oleh empat pertanyaan penelitian. Hasil temuan menunjukkan bahwa responden umumnya menganggap penundaan Kurikulum 2013 adalah kebijakan yang kurang baik atau negatif. Responden cenderung merasa kecewa dengan kebijakan penundaan Kurikulum 2013, karena memubazirkan anggaran. Penundaan Kurikulum 2013 bukan kebijakan yang populer; dan penundaannya cukup mengecewakan, karena tidak ada kriteria yang jelas

dalam menentukan sekolah yang “siap” dan “belum siap” dalam melaksanakan Kurikulum 2013. Berdasarkan temuan ini, peneliti memiliki kesimpulan bahwa responden cenderung kecewa terhadap kebijakan penundaan Kurikulum 2013 oleh pemerintahan Jokowi – JK (Jusuf Kalla).

Pengambilan keputusan untuk menunda Kurikulum 2013 dan munculnya sikap kecewa terhadap kebijakan tersebut, keduanya merupakan “keberhasilan” media. Tentu saja, dua media yang memiliki misi yang berbeda, yaitu media yang mendorong segera menunda Kurikulum 2013 dan media yang memengaruhi masyarakat agar menolak kebijakan tersebut. Keberhasilan media mempengaruhi masyarakat, sebagaimana telah dibahas dalam tinjauan pustaka, tidak terlepas dari faktor-faktor berikut:

Pemanfaatan *multi-channel* dengan konten yang sama, sehingga seolah-olah banyak orang yang berpendapat sama. Dalam hal ini berlaku teori kultivasi, yang didengungkan secara berulang melalui *mainstreaming* dan *resonance* (Morissan, 2010), sehingga seolah-olah guru semuanya menolak Kurikulum 2013. Data penelitian menunjukkan sebaliknya, yakni para guru pada umumnya justru menerima Kurikulum 2013 dengan baik.

Adanya kondisi hubungan antara media dan kekuasaan yang saling bekerjasama untuk menentukan agenda politik, atau sering juga disebut sebagai *high-power source*, *high-power media*, sebagaimana dinyatakan oleh Stephen W. Littlejohn & Karen A. Foss (2009) dan W. Morissan, A. Corry & F. Hamid (2010).

Media telah memanfaatkan dan memilih berita yang menguntungkan saja untuk mempengaruhi persepsi masyarakat. Diberitakan oleh *Detiknews*, misalnya, pada hari Rabu, 12 November 2014, pukul 14:11 WIB (Waktu Indonesia Barat) bahwa Menteri Anis Baswedan berkunjung ke SMA (Sekolah Menengah Atas) Negeri 87 Rempoa, Jakarta dan mendengar keluhan siswa soal Kurikulum 2013. Menteri Anis Baswedan kemudian mendengarkan presentasi siswa yang berjudul “Memimpikan Sekolah yang Menyenangkan”. Ada lima siswa yang

menyampaikan harapannya. Mereka adalah Ahmad Dhiya Ilmam Putra, Dinda Putri Mulia, Imaduddin Irza Mohamad, Nadhif Rafifaiz Kurniawan, dan Parardhaya Amara Putri Puntarangi. Para siswa mengeluhkan Kurikulum 2013 yang dinilai sangat memberatkan. Dinda Putri Mulia, misalnya, menyatakan bahwa dulu mata pelajaran *cuma* 12 buah, sekarang 15 buah sehingga itu sangat memberatkan. Selain itu banyak *ngabisin* uang, karena harus beli-beli buku baru. Guru juga mengajarnya *nggak* efektif. Keluhan siswa tersebut di-resonansi-kan untuk segera menunda Kurikulum 2013 (dalam *Detiknews*, 12/11/2014).

Peneliti tidak dapat menelusuri lebih jauh tentang pembentukan opini publik di atas. Namun fakta menunjukkan bahwa keberhasilannya cukup signifikan. Hal ini tidak terlepas dari keadaan politik pada saat itu, dimana penguasa (pemerintah Jokowi - JK) memiliki keinginan untuk adanya gebrakan politik; dan pada sisi yang lain, media memiliki kepentingan untuk menaikkan *rating*-nya.

Temuan ketiga, menunjukkan bahwa responden memiliki alasan tertentu untuk menolak Kurikulum 2013, yaitu pertama karena Kurikulum 2013 dikembangkan secara terburu-buru dan dipaksakan. Sedangkan alasan di luar itu, seperti tidak memberi ruang kreativitas bagi guru dan tidak menjamin meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, justru tidak diakuinya dan ditolak oleh para guru sendiri. Dengan data ini, peneliti berpendapat bahwa guru pada dasarnya memiliki semangat untuk mengembangkan Kurikulum 2013, bersedia untuk mengajar lebih kreatif, dan memiliki keyakinan bahwa Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang dapat dilaksanakan di sekolah oleh mereka.

Namun demikian, opini masyarakat telah terbentuk dengan kuat, sehingga Menteri Anis Baswedan mengeluarkan kebijakan penundaan agar isu kontroversi tersebut dapat diredam. Dengan keluarnya kebijakan penundaan terhadap Kurikulum 2013, para guru "politisi" merasa perjuangannya telah berhasil dengan baik. Dengan memanfaatkan isu-isu

kelemahan implementasi Kurikulum 2013, yaitu keterlambatan distribusi buku dan kelemahan sistem penilaian otentik, mereka berhasil mempengaruhi Menteri Anis Baswedan untuk menunda Kurikulum 2013.

Temuan penelitian keempat, menunjukkan sikap guru yang cenderung lebih "nyaman" dengan melaksanakan kurikulum lama, yaitu Kurikulum 2006. Penulis memiliki anggapan bahwa pendapat ini didasarkan oleh sebab-sebab berikut ini:

Guru pada dasarnya mampu melaksanakan Kurikulum 2013, namun memerlukan petunjuk yang rinci. Ketika Kurikulum 2013 di-*launching*, banyak guru yang berburu mencari contoh RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), dan tentu saja pihak Kemendikbud RI (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia) tidak mampu menunjukkan contoh RPP dan juga tidak mampu memberikan contoh instrumen penilaian otentik menurut versi Kurikulum 2013. Dengan demikian, guru merasa "tidak nyaman" dengan Kurikulum 2013, karena kelengkapannya belum tersedia. Oleh karena itu, mereka cenderung memilih Kurikulum 2006 saja, karena perangkat-perangkat pembelajarannya sudah tersedia (tidak perlu membuat RPP baru dan tidak perlu membuat perangkat penilaian otentik).

Merdeka.com, misalnya, pada hari Selasa, 7 Oktober 2014, pukul 09:47 WIB (Waktu Indonesia Barat), menurunkan berita bahwa UIK (Unit Implementasi Kurikulum) yang dibentuk oleh Kemendikbud RI di awal implementasi Kurikulum 2013, menerima banyak pertanyaan. Jumlahnya lebih dari 3,000 guru dan pertanyaan yang diajukan bermacam-macam, mulai dari hal sederhana hingga meminta contoh RPP (*Merdeka.com*, 7/10/2014). Tidak diberitakan apakah UIK mampu menjawab pertanyaan guru tersebut atau tidak, tetapi peneliti menduga bahwa pihak UIK tidak mampu memenuhi kebutuhan guru dalam waktu singkat.

Di berbagai pelatihan dan *workshop* guru di daerah-daerah, guru sering "terjebak" untuk membicarakan aspek-aspek administratif dalam penyusunan RPP. Mereka lebih suka berdebat tentang

sistematikanya daripada tentang inovasi pembelajaran yang harus terkandung didalam RPP. Dalam penilaian, mereka lebih suka mendiskusikan tentang rumus-rumus perhitungan mengolah nilai sikap, nilai kognitif, dan keterampilan daripada tentang komponen hasil belajar yang perlu diukur dan dinilai. Dengan fakta ini, penulis memiliki pendapat bahwa ketika rancangan Kurikulum 2013 lebih rumit (administrasinya) daripada kurikulum sebelumnya, maka sebagian guru akan menolak Kurikulum 2013 dengan tegas.

Berikutnya, yang menyebabkan guru cenderung lebih “nyaman” melaksanakan Kurikulum 2006 adalah budaya birokrasi (feodal) yang sudah lama “mengekan” kreativitas guru. Kepala Sekolah dan Pengawas lebih banyak berperan sebagai atasan daripada teman sejawat, yang dapat berdiskusi tentang model pembelajaran dan sistem penilaian. Perdebatan antara Guru dan Pengawas kerap terjadi dengan hasil yang tidak memuaskan bagi Guru, karena Pengawas merasa paling tahu dan memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada Guru.

Sebagai contoh, jika guru lebih suka mengatur pembelajaran Saintifik dengan langkah 5 M (Mengamati, Menanya, Mencari data, Mengasosiasi, dan Mengkomunikasikan) yang dibagi berdasarkan alokasi waktu sesuai silabus, sedangkan Pengawas lebih cenderung menyarankan agar setiap pertemuan memiliki semua unsur 5 M dalam setiap pertemuan. Perbedaan pendapat ini berlarut-larut dan hasilnya akan dimenangkan oleh pihak Pengawas Sekolah. Dengan kondisi ini, akhirnya banyak Guru yang mengeluh dan merasa kebingungan. Seandainya Guru memiliki kebebasan berpendapat tentang teknis pengelolaan kelas, maka seharusnya tidak perlu mendengarkan pendapat para Pengawas Sekolah, karena kedua pendekatan yang diperdebatkan oleh mereka semuanya dapat dibenarkan.

Temuan kelima adalah tentang keberatan sebagian guru terhadap Kurikulum 2013. Ada dua alasan yang membuat responden keberatan dengan kebijakan Kurikulum 2013, yaitu: (1) penilaian otentik yang rumit;

dan (2) kesiapan sarana dan prasarana di sekolah yang tidak memadai. Adapun tiga alasan lainnya (keterbatasan kemampuan menggunakan komputer, pendekatan saintifik, dan jumlah jam belajar bagi peserta didik di sekolah) tidak menjadi alasan terhadap kebijakan Kurikulum 2013. Artinya, guru pada umumnya mampu menyesuaikan diri untuk melaksanakan Kurikulum 2013, walaupun harus menggunakan komputer (multimedia dan internet) pada saat pembelajaran. Selain itu, guru juga mampu menerapkan pendekatan saintifik di kelas.

Permasalahan lain yang terkait dengan bertambahnya beban belajar bagi peserta didik, nampaknya guru dapat menyesuaikan diri, bahkan sebagian guru yang memiliki tuntutan untuk melakukan tatap muka pembelajaran minimal 24 jam per minggu, merasa sangat diuntungkan dengan adanya Kurikulum 2013.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan di atas, peneliti menyimpulkan beberapa hal, yakni bahwa persepsi yang positif terhadap Kurikulum 2013 merupakan modal awal untuk membina guru dalam menerapkan Kurikulum 2013. Jika Kabinet Joko Widodo - JK (Jusuf Kalla) akan meneruskan Kurikulum 2013, maka sebaiknya selain melakukan upaya perbaikan sistem yang masih lemah, juga perlu meminta bantuan media agar mereka ikut-serta mendukung kebijakan Kurikulum 2013.

Kurikulum 2013 sejatinya sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menghadapi era masa depan. Walaupun banyak kelemahannya, tetapi masyarakat cenderung kecewa jika pelaksanaannya ditunda. Untuk menyikapi masalah ini, sebaiknya kebijakan penundaan Kurikulum 2013, yang telah ditetapkan melalui *Permendikbud RI (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia) Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013* (Kemendikbud RI, 2014a), dijadikan motivasi bagi sekolah dan para guru untuk lebih menyiapkan diri lebih optimal, baik meningkatkan diri pada aspek kompetensi

pedagogik maupun kompetensi profesional.

Guru yang keberatan dengan Kurikulum 2013 dan/atau lebih suka dengan Kurikulum 2006, ternyata bukan disebabkan oleh faktor “kelemahan” Kurikulum 2013, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh budaya guru dan budaya birokratis. Budaya guru yang dianggap menghambat perubahan, antara lain, kebiasaan guru yang ingin memperoleh petunjuk dan pedoman yang serba rinci, ingin lebih mudah membuat perangkat pembelajaran seperti RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), ingin lebih mudah melakukan penilaian, dan seterusnya.

Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar ke depan, pola pembinaan guru lebih diarahkan pada penumbuh-kembangan kreativitas daripada pelatihan yang bersifat administratif. Untuk mengurangi budaya birokratis, bagi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah nampaknya perlu lebih diberdayakan fungsi supervisinya daripada fungsi manajerialnya.

Saran perbaikan untuk Kurikulum 2013 adalah pada sistem penilaian yang lebih praktis dan rasional. Saran lainnya, dalam penyediaan buku agar tetap disediakan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini oleh Pusurbuk (Pusat Kurikulum dan Perbukuan). Dengan fakta ini, peneliti mengajukan saran agar pelatihan tentang pembelajaran saintifik tidak terpisah dari pelatihan tentang penilaian otentik dan pendalaman buku siswa. Setiap penyelenggara pelatihan, ketiga tema (pembelajaran saintifik, penilaian otentik, dan buku siswa) harus diintegrasikan.³

Referensi

Alvin, Silvanus. (2015). “Tak Semua Puas Jokowi-JK”. Tersedia secara online di: <http://news.liputan6.com/read/2345120/tak-semua-puas-jokowi-jk> [diakses di Bandung, Indonesia: 28 Februari 2016].

³*Pernyataan:* Dengan ini saya menyatakan bahwa artikel ini merupakan hasil penelitian dan karya ilmiah saya sendiri. Ianya bukan hasil dari kegiatan plagiat. Sumber-sumber yang saya kutip, jelas tercantum dalam Referensi. Artikel tersebut secara keseluruhan atau sebagian juga belum dipublikasikan atau disampaikan kepada jurnal ilmiah lainnya.

- Ary, Donald et al. (2010). *Introduction to Research in Education*. Australia, Brazil, Japan, Korea, Mexico, Singapore, Spain, United Kingdom, and United States of America: Wadsworth, Cengage Learning, eighth edition.
- Brady, Laurie. (1990). *Curriculum Development*. Australia: Prentice Hall.
- Bugin, Burhan. (2013). *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ciremai Post [surat kabar]. Kuningan: Sabtu, 20 Desember 2014, pukul 17:31 WIB [Waktu Indonesia Barat].
- Depdiknas RI [Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia]. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Detiknews [situs berita]. Jakarta: Rabu, 12 Nopember 2014, pukul 14:11 WIB [Waktu Indonesia Barat].
- Hamad, Ibnu. (2003). “Menggugat Pers dan Partai Politik dalam Panggung Wacana Politik Indonesia” dalam Mahrus Irsyam & Lili Romli [eds]. *Menggugat Partai Politik*. Depok: Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI [Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia].
- Hamalik, Oemar. (2007). *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Harahap, Mula. (2010). “Kemelut dalam Industri Penerbitan Buku Sekolah dan Bagaimana Penerbit Mengatasinya”. Tersedia secara online di: <https://mulaharahap.wordpress.com/2010/06/26/622/> [diakses di Bandung, Indonesia: 28 Februari 2016].
- Hasan, M. Iqbal. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasan, Said Hamid. (2007). “Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan” dalam Mohammad Ali et al. [eds]. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. Bandung: Pedagogiana Press.
- Hasan, Said Hamid. (2008). *Evaluasi Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hertono, Broto R. (1977). *Cara-cara Sampling*. Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat UI [Univesitas Indonesia].
- “Ini Penjelasan M. Nuh tentang Kurikulum 2013” dalam KOMPAS.Com. Jakarta: 4 Mei 2013. Tersedia secara online juga di: <http://edukasi.kompas.com/read/2013/05/04/21062649/Ini.Penjelasan.M.Nuh.Tentang.Kurikulum.2013> [diakses di Bandung, Indonesia: 28 Februari 2016].
- Juliaman. (2014). “Kurikulum 2013: Dievaluasi, Dihentikan, Ditunda, atau Dihapus?”. Tersedia secara online di: <http://politik.kompasiana.com/2014/12/07/kurikulum-2013-dievaluasi-dihentikan-ditunda-atau-dihapus-708939.html> [diakses di Bandung, Indonesia: 3 Januari 2016].
- Karli, Hilda. (2014). “Perbedaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006 dan Kurikulum 2013 untuk Jenjang Sekolah Dasar” dalam PENABUR: *Jurnal Pendidikan*, No.22, Th.13, Juni, hlm.84-96.
- Kemendikbud RI [Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia]. (2012). *Bahan*

- Uji Publik Kurikulum 2013. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kemendikbud RI [Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia]. (2013a). *Permendikbud RI (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kemendikbud RI [Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia]. (2013b). *Permendikbud RI (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia) Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kemendikbud RI [Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia]. (2013c). *Permendikbud RI (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia) Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kemendikbud RI [Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia]. (2014a). *Permendikbud RI (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia) Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kemendikbud RI [Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia]. (2014b). *Permendikbud RI (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia) Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kompas.com [situs berita]. Jakarta: Rabu, 13 Agustus 2014, pukul 11:13 WIB [Waktu Indonesia Barat].
- Littlejohn, Stephen W. & Karen A. Foss. (2009). *Teori Komunikasi: Theories of Human Communication*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, edisi ke-9, Terjemahan.
- Marlina, Murni Eva. (2013). "Kurikulum 2013 yang Berkarakter" dalam *JPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol.5, No.2, Desember, hlm.27-38.
- MENPAN-RB RI (Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia). (2014). *Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- Merdeka.com [situs berita]. Jakarta: Selasa, 7 Oktober 2014, pukul 09:47 WIB [Waktu Indonesia Barat].
- Morissan, W. (2010). *Psikologi Komunikasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Morissan, W. (2013). *Teori Komunikasi: Dari Individu hingga Massa*. Jakarta: Penerbit Kecana Prenadamedia Group.
- Morissan, W., A. Corry & F. Hamid. (2010). *Teori Komunikasi Massa: Media, Budaya, dan Masyarakat*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nasution, Sorimuda. (2010). *Kurikulum dan Pengajaran*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Noelle-Neumann, Elisabeth. (2009). "Spiral of Silence" dalam Richard West & Lynn Turner [eds]. *Introducing Communication Theory: Analysis and Application*. New York: McGraw-Hill Education.
- Nurudin. (2007). *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Okezone [situs berita]. Jakarta: Kamis, 11 Desember 2014, pukul 17:42 WIB [Waktu Indonesia Barat].
- Okezone [situs berita]. Jakarta: Sabtu, 13 Desember 2014, pukul 17:03 WIB [Waktu Indonesia Barat].
- Putri, Indha Novita (2015). "Spasialisasi dan Konglomerasi Media: Analisis Deskriptif Ekonomi-Politik Media pada Kelompok Kompas Gramedia". *Makalah Tidak Diterbitkan*. Kota Malang: Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNIBRAW [Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya].
- RMOL.Co [situs berita]. Jakarta: Senin, 17 November 2014, pukul 07:02:00 WIB [Waktu Indonesia Barat].
- Sanjaya, Wina. (2010). *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan KTSP*. Jakarta: Kecana Prenada Media Group.
- Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Severin, Werner J. & James W. Tankard. (2014). *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di dalam Media Massa*. Jakarta. Kecana Prenada Media Group, Terjemahan.
- "Siapa Ahok?". Tersedia secara online di: <http://ahok.org/tentang-ahok/siapa-ahok/> [diakses di Bandung, Indonesia: 28 Februari 2016].
- Siebert, Fred S. et al. (1986). *Empat Teori Pers*. Jakarta: PT Intermedia, Terjemahan.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suwirta, Andi. (2015). *Revolusi Indonesia dalam News & Views: Sebuah Antologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Tempo.Co [situs berita]. Jakarta: Rabu, 10 Desember 2014, pukul 15:46 WIB [Waktu Indonesia Barat].
- Wijaya, Yoga Permana. (2015). "Analisis mengenai Alasan Penundaan Kurikulum 2013". Tersedia secara online di: <https://yogapermanawijaya.wordpress.com/2015/01/15/analisis-mengenai-alasan-penundaan-kurikulum-2013> [diakses di Bandung, Indonesia: 28 Februari 2016].
- Witarto. (2008). *Memahami Pengolahan Data*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Yani, Ahmad. (2014). *Mindset Kurikulum 2013*. Bandung: Penerbit Alfabeta.